

ABSTRAK

Ade Candra Kurnia. *“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 01 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 04 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah” (Studi Kasus Pencatatan Kematian Di Kabupaten Tasikmalaya)”*.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya pengurusan mengenai pencatatan kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga tidak semua penduduk yang meninggal melakukan kegiatan pelaporan dan pengurusan akta kematian. Penerbitan akta kematian bagi warga negara yang sudah meninggal adalah hal yang harus dilakukan, karena akta kematian memiliki fungsi yang sangat penting bagi individu maupun negara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya terhadap pencatatan kematian, untuk mengetahui faktor penghambat, dan untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 01 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deksriptif dengan pendekatan studi kasus. data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri atas data primer dan sekunder, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang mempunyai empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dan selain itu penelitian ini menggunakan teori siyasah dusturiyah, teori masalah mursalah dan saddu al-dzari'ah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 01 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 04 tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan ada tiga faktor yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis. 2) Dalam pelaksanaan komunikasi yang dilaksanakan oleh pihak Disdukcapil yaitu melalui informasi, namun masih ada masyarakat yang belum mengetahui dengan informasi yang diberikan oleh Disdukcapil. Sumberdaya diantaranya staf pada Disdukcapil masih kurang dengan kemampuannya, informasi dalam hal sosialisasi telah dilaksanakan oleh Disdukcapil namun masih belum tepat sasaran. Selanjutnya untuk disposisi yang dilakukan oleh Disdukcapil adalah dengan memberikan Surat Keputusan (SK) kepada para pelaksana kebijakan. Dan terkait dengan struktur birokrasi bahwa SOP pada Disdukcapil telah terlaksana dengan baik dan laporan pertanggungjawabannya telah dibuat dan dilaporkan kepada Provinsi setiap bulanya. 3) Fiqh Siyasah Dusturiyah memandang bahwa dampak positif yang dihasilkan dari Peraturan Daerah tersebut merupakan kemaslahatan yang harus dijaga dengan baik, karena menjunjung kemaslahatan umat merupakan tujuan Siyasah Dusturiyah.

Kata Kunci : Pelaksanaan, peraturan daerah, pencatatan kematian, administrasi kependudukan.